

ABSTRAK

Transformasi digital pada sektor pertanahan melalui penerapan sertifikat tanah digital merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kualitas pelayanan pertanahan. Meskipun demikian, penerapan sertifikat tanah digital masih menimbulkan berbagai persepsi di masyarakat, terutama terkait keamanan informasi, risiko kebocoran data, dan kepercayaan terhadap pemerintah sebagai penyelenggara layanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat mengenai keamanan informasi dan isu kebocoran data serta faktor-faktor yang membentuk kepercayaan masyarakat terhadap sertifikat tanah digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap lima orang masyarakat dan satu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Analisis data dilakukan menggunakan *Thematic Analysis* Braun dan Clarke (2006) dengan berlandaskan *Information Security Theory* dan *Trust Theory* (*Ability, Benevolence, dan Integrity*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memandang keamanan informasi sebagai faktor utama dalam membangun kepercayaan terhadap sertifikat tanah digital karena sertifikat memuat data pribadi serta informasi kepemilikan tanah yang memiliki nilai hukum dan ekonomi yang tinggi. Di sisi lain, pengalaman terhadap berbagai kasus kebocoran data di Indonesia membentuk persepsi risiko yang memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital. Penelitian ini juga menemukan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sertifikat tanah digital dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola sistem secara aman (*ability*), komitmen pemerintah dalam melindungi kepentingan masyarakat (*benevolence*), serta integritas pemerintah melalui transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi dalam menjaga keamanan data (*integrity*). Selain itu, keamanan informasi, transparansi pemerintah, sosialisasi, serta manfaat yang dirasakan masyarakat menjadi faktor-faktor utama dalam membentuk kepercayaan terhadap sertifikat tanah digital. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat pada dasarnya mendukung digitalisasi pertanahan, namun kepercayaan terhadap sertifikat tanah digital bersifat bersyarat

dan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam memberikan jaminan keamanan informasi serta perlindungan data yang memadai.

Kata kunci: sertifikat tanah digital, keamanan informasi, persepsi risiko, kepercayaan masyarakat, kebocoran data.

ABSTRACT

The digital transformation of land administration through the implementation of digital land certificates is one of the Indonesian government's efforts to improve the efficiency, security, and quality of land services. However, the implementation of digital land certificates has raised various public concerns, particularly regarding information security, data breach risks, and trust in the government as the service provider. This study aims to analyze public perceptions of information security and data breach issues, as well as the factors influencing public trust in digital land certificates. This research employed a qualitative approach using a case study method. Data were collected through in-depth interviews with five members of the public and one Land Deed Official (PPAT). The data were analyzed using Braun and Clarke's (2006) Thematic Analysis, guided by Information Security Theory, Risk Perception Theory, and Trust Theory (Ability, Benevolence, and Integrity).

The findings indicate that the public considers information security to be the primary factor in developing trust in digital land certificates because these certificates contain personal information and land ownership data with significant legal and economic value. At the same time, previous experiences with data breach incidents in Indonesia have shaped public risk perceptions, which influence trust in digital systems. The study also found that public trust in digital land certificates is influenced by the government's ability to manage the system securely (ability), its commitment to protecting public interests (benevolence), and its integrity demonstrated through transparency, accountability, and consistency in safeguarding public data (integrity). Furthermore, information security, government transparency, public awareness initiatives, and the perceived benefits of digital land certificates were identified as the main factors shaping public trust. The findings suggest that although the public generally supports the digitalization of land administration, their trust in digital land certificates remains conditional and largely depends on the government's ability to ensure information security and adequate data protection.

Keywords: *digital land certificate, information security, risk perception, public trust, data breach.*